

KETERBATASAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN ASN DAERAH: STUDI KASUS POLEMIC GAJI PPPK

Mohamad Djasuli¹, Arsita Dwi Ayu Stevani²,
Dila Aprilia Wulandari³, Zidan Rahman Hayat⁴
Universitas Trunojoyo Madura Akutansi FEB^{1,2,3,4}
djasuli@trunojoyo.ac.id¹, 230221100017@student.trunojoyo.ac.id²,
230221100025@student.trunojoyo.ac.id³,
230221100046@student.trunojoyo.ac.id⁴

ABSTRACT

The limitation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is one of the crucial issues in this study aims to analyze the impact of the limited Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) on the welfare of the State Civil Apparatus (ASN), especially in the polemic of the salaries of Government Employees with Work Agreements (PPPK). The method used is descriptive qualitative through literature study and public policy analysis based on fiscal decentralization theory. The results of the study show that the imbalance between the central government's ASN appointment policy and regional fiscal capacity causes budget pressure, which has an impact on salary payment delays, uncertainty of benefits, and a decrease in PPPK's work motivation. In addition, weak coordination between levels of government worsens the implementation of the merit system in ASN management. The conclusion of this study emphasizes that the limitations of the APBD have direct implications for the welfare of regional civil servants, so that more synchronous policies and strengthening regional fiscal capacity are needed to ensure the sustainability of the payment of civil servant rights.

Keywords: APBD, fiscal capacity, ASN welfare, PPPK, fiscal decentralization

ABSTRAK

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu isu krusial dalam Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam polemic gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis kebijakan publik berbasis teori desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kebijakan pengangkatan ASN oleh pemerintah pusat dan kapasitas fiskal daerah menimbulkan tekanan anggaran, yang berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji, ketidakpastian tunjangan, serta penurunan motivasi kerja PPPK. Selain itu, lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan memperburuk implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Simpulan penelitian ini

menegaskan bahwa keterbatasan APBD berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan ASN daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih sinkron dan penguatan kapasitas fiskal daerah guna menjamin keberlanjutan pembayaran hak ASN.

Keywords: APBD, kapasitas fiskal, kesejahteraan ASN, PPPK, desentralisasi fiskal

A. Pendahuluan

Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi daerah. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai dinamika, khususnya terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai belanja pegawai. Fenomena yang berkembang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan rekrutmen ASN yang bersifat sentralistik dengan kapasitas fiskal daerah yang beragam. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai persoalan, seperti keterlambatan pembayaran gaji, ketidakpastian tunjangan, serta tekanan fiskal pada daerah dengan kapasitas keuangan rendah (Taufik, 2025; Rahim & Maharudin, 2025). Bahkan, dalam

praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran di beberapa daerah memunculkan fenomena anomali, seperti pergeseran peran ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi, yang pada akhirnya menimbulkan kritik terhadap arah kebijakan publik (Anggraeni, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPPK masih menghadapi persoalan mendasar, baik dari sisi kepastian hukum, sistem merit, maupun kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Ketidakpastian dalam pemberian tunjangan kinerja antara PNS dan PPPK menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan dalam sistem manajemen ASN (Akmala & Hapsari, 2025). Di sisi lain, penerapan sistem merit yang belum optimal turut memperlemah efektivitas pengelolaan talenta ASN di daerah (Fadilla, 2025). Permasalahan ini diperkuat oleh adanya ketidaksesuaian implementasi kebijakan pengangkatan ASN yang tidak sepenuhnya selaras dengan

asas umum pemerintahan yang baik (Seniwati et al., 2025). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persoalan PPPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan fiskal daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji isu PPPK dan ASN, sebagian besar masih berfokus pada aspek yuridis, normatif, dan administratif, seperti perlindungan hukum tenaga honorer, mekanisme rekrutmen, serta netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ikhsana & Kosariza, 2022; Pratama & Putera, 2022; Rahmansyah & Irwandi, 2021; Muhaemin et al., 2023). Penelitian lain juga menyoroti aspek sosial dan psikologis ASN, seperti kesejahteraan dan persepsi publik terhadap profesi ASN (Mashfiya & Adawiyah, 2025; Elyasa, 2023). Namun demikian, kajian yang secara komprehensif menghubungkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dengan kesejahteraan ASN, khususnya PPPK, masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks desentralisasi, kapasitas fiskal merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik di

daerah. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap), yaitu kurangnya integrasi antara perspektif fiskal dan manajemen sumber daya aparatur dalam menganalisis kesejahteraan ASN daerah.

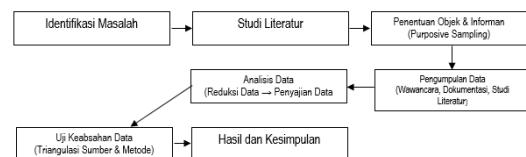
Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif desentralisasi administratif dan fiskal yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Abdillahi, 2025; Ramadhani & Adiazmil, 2025). Desentralisasi fiskal yang tidak diimbangi dengan kapasitas keuangan daerah yang memadai berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta ketimpangan antar daerah (Anggriawan et al., 2025; Ginanjar et al., 2025). Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan erat dengan kinerja pemerintahan dan kualitas tata kelola, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan aparatur (Astriana & Khoirunurrofik, 2024; Priscilla et al., 2025). Dalam konteks ini, tekanan fiskal akibat peningkatan belanja pegawai dapat

mengurangi ruang fiskal daerah untuk sektor lain serta menurunkan kualitas layanan publik (Diffia et al., 2025; Hidayat et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keterbatasan APBD memengaruhi kesejahteraan ASN daerah, khususnya PPPK; dan (2) bagaimana ketidakseimbangan antara kebijakan pengangkatan ASN dan kapasitas fiskal daerah berdampak pada tata kelola pemerintahan daerah. Rumusan masalah ini menjadi penting mengingat implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kesejahteraan ASN serta mengidentifikasi implikasi kebijakan pengangkatan PPPK terhadap beban keuangan daerah. Posisi penelitian ini berada pada upaya pengisian celah dalam literatur dengan mengintegrasikan perspektif desentralisasi fiskal dan manajemen ASN dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung

parsial baik berfokus pada aspek hukum, administratif, maupun sosial— penelitian ini menekankan pada keterkaitan langsung antara kapasitas fiskal daerah dan kesejahteraan ASN sebagai determinan utama dalam kinerja organisasi publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian administrasi publik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, sinkron, dan berkeadilan fiskal.

B. Metode Penelitian



Gambar 1. Alur Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif

Alur penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan penentuan objek penelitian serta informan menggunakan teknik purposive sampling. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Hasil dari seluruh tahapan tersebut kemudian dirumuskan menjadi temuan penelitian dan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dampaknya terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam konteks yang alamiah dan kompleks. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan APBD dan implikasinya terhadap kesejahteraan ASN daerah, dengan fokus pada PPPK. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal, sehingga relevan

dengan permasalahan yang dikaji. Pemilihan objek dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan karakteristik daerah yang mengalami tekanan fiskal dan memiliki jumlah PPPK yang signifikan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat pengelola keuangan daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta ASN/PPPK yang terdampak kebijakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan APBD, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur untuk memperoleh data yang komprehensif.

Instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, sehingga

diperlukan kepekaan dan ketelitian dalam memahami konteks penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen serta hasil penelitian terdahulu.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar fenomena. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data yang telah dianalisis. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No	Aspek yang Dikaji	Temuan Utama
1	Kapasitas Fiskal Daerah	Terdapat keterbatasan APBD pada daerah tertentu yang menyebabkan tekanan pada belanja pegawai
2	Pembayaran Gaji PPPK	Ditemukan indikasi keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan
3	Kesejahteraan ASN	PPPK mengalami ketidakpastian kesejahteraan dibandingkan PNS
4	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan pengangkatan PPPK belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah
5	Dampak Organisasi	Terjadi penurunan motivasi kerja dan potensi penurunan kinerja ASN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Temuan ini secara logis dapat dipahami melalui perspektif desentralisasi fiskal, di mana kapasitas keuangan daerah menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam kerangka teori, desentralisasi fiskal menekankan

pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan sumber daya keuangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan tersebut, yang ditandai dengan ketidakmampuan daerah dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai secara optimal. Kondisi ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan kapasitas antar daerah (Ginjar et al., 2025; Anggriawan et al., 2025).

Secara lebih spesifik, kebijakan pengangkatan PPPK yang bersifat nasional tampaknya belum sepenuhnya mempertimbangkan variasi kapasitas fiskal daerah. Dari sudut pandang kebijakan publik, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang kurang adaptif terhadap konteks lokal. Logika kebijakan yang tidak kontekstual ini menghasilkan beban fiskal tambahan bagi daerah, sebagaimana terlihat dari meningkatnya proporsi belanja pegawai dalam APBD. Dalam penelitian ini, fenomena tersebut tercermin pada temuan mengenai keterbatasan ruang fiskal daerah setelah pengangkatan PPPK. Hal ini

sejalan dengan penelitian Taufik (2025) serta Rahim dan Maharudin (2025) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan PPPK berpotensi menimbulkan tekanan anggaran apabila tidak diiringi dengan dukungan fiskal yang memadai.

Dampak dari tekanan fiskal tersebut kemudian berimplikasi langsung pada kesejahteraan ASN. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, yang secara logis mencerminkan lemahnya kapasitas keuangan daerah. Dalam perspektif teori keadilan organisasi, kondisi ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara ASN, terutama ketika dibandingkan dengan PNS yang memiliki jaminan kesejahteraan yang lebih stabil. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Akmala dan Hapsari (2025) yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemberian tunjangan kinerja antara PNS dan PPPK. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterbatasan fiskal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada persepsi keadilan dalam organisasi publik.

Lebih lanjut, secara logis, ketidakpastian kesejahteraan akan

berdampak pada motivasi kerja ASN. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, kesejahteraan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja individu dan organisasi. Ketika kebutuhan dasar pegawai tidak terpenuhi secara optimal, maka motivasi kerja cenderung menurun, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan motivasi kerja ASN sebagai akibat dari ketidakpastian kesejahteraan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mashfiya dan Adawiyah (2025) yang menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis memiliki hubungan erat dengan kinerja individu. Dengan demikian, hubungan antara keterbatasan APBD, kesejahteraan ASN, dan kinerja organisasi dapat dipahami sebagai suatu rantai sebab-akibat yang saling berkaitan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi sistem merit dalam pengelolaan ASN belum berjalan secara optimal. Dalam konteks teori administrasi publik, sistem merit seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan ASN untuk menjamin profesionalitas dan

keadilan. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip merit dengan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks pengangkatan dan pengelolaan PPPK. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan ini didukung oleh penelitian Fadilla (2025) serta Seniwati et al. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi sistem merit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi maupun praktik di daerah. Dalam konteks yang lebih luas, tekanan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga mendorong munculnya kebijakan-kebijakan yang bersifat adaptif, namun tidak selalu rasional dalam jangka panjang. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kebijakan efisiensi yang berdampak pada penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Secara logis, kondisi ini merupakan bentuk respons jangka pendek terhadap keterbatasan anggaran, namun berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam jangka

panjang. Hal ini sejalan dengan temuan Anggraeni (2025) yang menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang tidak tepat dapat mengganggu profesionalitas ASN dan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam teori desentralisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Ketergantungan tersebut membatasi kemampuan daerah dalam mengelola kebijakan secara mandiri, termasuk dalam hal pembiayaan ASN. Temuan ini konsisten dengan penelitian Anggriawan et al. (2025) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi persoalan ketergantungan antar level pemerintahan. Secara logis, selama ketergantungan ini masih tinggi, maka kemampuan daerah dalam menjamin kesejahteraan ASN akan tetap terbatas.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan APBD bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan desain

kebijakan desentralisasi, tata kelola ASN, dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus mencakup perbaikan pada level kebijakan nasional dan daerah secara simultan. Dengan pendekatan yang lebih integratif, diharapkan kebijakan pengangkatan PPPK dapat berjalan secara lebih berkelanjutan dan mampu menjamin kesejahteraan ASN secara optimal.

D. Kesimpulan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan tekanan pada belanja pegawai, yang berimplikasi pada ketidakpastian pembayaran gaji dan tunjangan PPPK. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi pegawai, tetapi juga berdampak pada motivasi kerja dan kinerja organisasi. Selain itu, ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan kemampuan fiskal daerah memperkuat ketimpangan dalam implementasi kebijakan ASN. Dengan demikian,

kesejahteraan ASN tidak dapat dipisahkan dari kapasitas fiskal daerah sebagai faktor utama dalam menjamin keberlanjutan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang berfokus pada pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif besaran pengaruh keterbatasan APBD terhadap kesejahteraan ASN. Selain itu, keterbatasan data empiris lapangan menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan pada interpretasi berbasis literatur dan temuan umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan terukur. Di sisi kebijakan, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan sinkronisasi dalam perencanaan pengangkatan PPPK dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan ASN agar tidak menimbulkan tekanan anggaran yang berdampak pada kesejahteraan dan kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: how individual and profession-level factors influence discussion of disability in prenatal genetic counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 1-3.
- Akmala, N., & Hapsari, V. R. (2025). Kepastian hukum dalam implementasi tunjangan kinerja guru ASN: Studi perbandingan antara PNS dan PPPK. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(12), 1301-1310.
<https://doi.org/10.51601/multilingua.l.v4i12.1301>
- Anggraeni, F. V. (2025). ASN menyapu jalan: Kebijakan efisiensi atau solusi yang keliru? Studi kasus Tik Tok iNews Jatim tenaga honorer dirumahkan ASN digantikan nyapu jalan. *Interelasi Humaniora*, 1(1), 87-95.
<https://doi.org/10.51601/ih.v1i1.87>
- Fadilla, Y. N. (2025). Analisis kualitatif penerapan sistem merit dalam manajemen talenta melalui konsep smart talent di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Journal Education and Government*, 3(1), 198-208.
<https://doi.org/10.51601/egov.v3i1.198>
- Abdillahi, M. M. (2025). Theoretical perspectives on administrative decentralization: Concepts, models, and implications. *International Journal of Research*

- and Innovation in Social Science, 9(8), 479.
<https://doi.org/10.47772/IJRIS.2025.908000479>
- Anggriawan, T., Susilo, & Prasetyia, F. (2025). Does fiscal decentralization lead to local-central fiscal dependency? *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(1).
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2025.011.01.11>
- Astriana, S., & Khoirunurrofik. (2024). Fiscal decentralization and governance performance: Evidence from Indonesian districts. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 15–29.
<https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Diffia, A., et al. (2025). Fiscal decentralization and the Keynesian multiplier in regional government. *Administrasi Publik*, 11(2).
<https://doi.org/10.26905/ap.v11i2.15888>
- Ginanjjar, R. A. F., et al. (2025). Fiscal decentralization and regional fiscal imbalance in Indonesia. *Information Technology Review*, 10(1).
<https://doi.org/10.33105/itrev.v10i1.1131>
- Hidayat, M. F., et al. (2025). Fiscal decentralization and public value: Literature review. *KnE Social Sciences*, 10(4).
<https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18043>
- Priscilla, H., Rindayati, W., & Anggraeni, L. (2025). Effect of fiscal decentralization and institutional performance on inclusive growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 174–192.
<https://doi.org/10.29244/jekp.14.2.2025.174-192>
- Rahim, A., & Maharudin, D. (2025). Implikasi fiskal dan tata kelola PPPK: Systematic literature review. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 13(3).
<https://doi.org/10.35450/jip.v13i03.1507>
- Ramadhani, D., & Adiazmil, A. (2025). The impact of administrative decentralization on local government performance. *International Journal of Social Science and Education*, 1(1).
<https://doi.org/10.62207/8x748k81>
- Mashfiya, W., & Adawiyah, S. R. (2025). Peran iklim madrasah dan kebersyukuran terhadap kesejahteraan psikologis guru honorer SD/MI. *Happiness: Journal of Psychology and Islamic Counseling*, 5(1), 2862-2875.
<https://doi.org/10.30762/happiness.v5i1.2862>
- Samuella, E. J., & Susanti, I. (2025). Tapera: Melindungi hak atas tempat tinggal atau mengancam kehidupan yang layak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(4).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.iss4.4>
-

- Seniwati, P., Daveri, E., Amelia, G., & Barus, S. I. (2025). Analisis ketidaksesuaian implementasi kebijakan pengangkatan ASN terhadap penundaan CPNS dan PPPK berdasarkan AUPB. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(4), 288-296. <https://doi.org/10.51601/causa.v3i4.288>
- Taufik, M. (2025). Dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(1), 6498-6505. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i1.6498>
- Maliq, A. R., & Gaol, S. L. (2024). Ratio legis pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggantikan keberadaan pegawai tidak tetap di Indonesia. *Lex Omnibus: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 76-88. <https://doi.org/10.51601/lo.v2i1.76>
- Winarsih, N., & Silviyana, S. (2024). Analisis perspektif guru Kabupaten Probolinggo terhadap munculnya kebijakan rekrutmen guru melalui marketplace. *Indonesian Journal of Social Science and Education*, 2(2), 132-140. <https://doi.org/10.51601/ijosse.v2i2.132>
- Elyasa, M. D. (2023). Analisis flexing dan hedonisme: Membentuk citra negatif ASN di media sosial. *Jurnal Andragogi*, 11(1), 21-35. <https://doi.org/10.37058/andragogi.v11i1.6789>
- Muhaemin, M., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Kajian yuridis mekanisme penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bima tahun 2019. *Iblam Law Review*, 3(1), 215-225. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.215>
- Wiryanan, I. W. G. (2023). Analisis yuridis terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri (Studi pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 6412-6420. <https://doi.org/10.32795/jhm.v3i1.6412>
- Ikhsana, K., & Kosariza, K. (2022). Analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 17386-17395. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.17386>
- Pratama, D. P., & Putera, R. E. (2022). Analisis rekrutmen ASN PPPK fungsional guru pada instansi daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 110-120.

[https://doi.org/10.25299/jiia.2022.v015\(2\).10045](https://doi.org/10.25299/jiia.2022.v015(2).10045)

Rahmansyah, A., & Irwandi, I. (2021). Analisis terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 16197-16205.
<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.16197>

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, N. P. (2012). Sources of method bias in social science research. *Annual Review of Psychology*, 63, 539–569.
<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100452>